

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Teologi pembebasan Aloysius Pieris menekankan pada pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidaksetaraan. Dalam kesimpulan, poin-poin utama teologi pembebasan Pieris dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pembebasan sosial dan ekonomi. Teologi ini mendorong pembebasan dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pieris mengajarkan bahwa iman dan keadilan sosial harus saling terkait dalam rangka mencapai pembebasan menyeluruh.
2. Kritik terhadap struktur penguasa. Pieris menyoroti struktur kekuasaan yang menindas dan mengeksploitasi. Teologinya mencita-citakan transformasi sosial yang mengarah pada kesejahteraan bersama.
3. Solidaritas dengan kaum miskin dan terpinggirkan. Pembebasan dalam pandangan Pieris melibatkan solidaritas yang mendalam dengan mereka yang menderita dan terpinggirkan dalam masyarakat. Ini memerlukan aksi nyata untuk memerangi ketidakadilan.
4. Kontekstualisasi teologi. Pieris menekankan pentingnya kontekstualisasi teologi yaitu menyelaraskan pesan keagamaan dengan kondisi nyata masyarakat. Teologi pembebasan harus relevan dan responsif terhadap tantangan konkret yang dihadapi oleh orang-orang miskin.
5. Dialog antar-agama. Dalam semangat pengakuan akan adanya keberagaman, Pieris menganjurkan dialog antar-agama untuk memahami dan menghormati kepercayaan budaya yang berbeda, dengan tujuan membangun perdamaian dan keadilan.

6. Pendekatan holistik. Teologi pembebasan Pieris bersifat menyeluruh dan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. pembebasan bukan hanya dari penindasan politik, tetapi juga dari ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan spiritual.
7. Pentingnya kebebasan rohani. Pembebasan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga rohani. Pieris menekankan pentingnya pembebasan dari segala bentuk dosa dan beban rohani yang dapat menghambat pertumbuhan manusia sebagai individu dan masyarakat.

Dengan demikian, kesimpulan dari teologi pembebasan Pieris adalah panggilan untuk berkomitmen pada pembebasan menyeluruh yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan rohani yang adil dan berkeadilan.

## **B. Saran**

### 1. Pemerintah

Kemiskinan adalah masalah serius yang harus diperangi. Karena itu, menurut penulis, pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam yang ada di bumi NTT perlu untuk mengelolah secara maksimal. Kemiskinan adalah isu serius yang harus diperangi. Menurut penulis, pemerintah di samping mengelola sumber daya alam yang ada di bumi, perlu juga dengan serius memerhatikan pembenahan sistem sosial yang ada. Pemerintah perlu mengevaluasi setiap program yang ada sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial yang dapat menyengsarakan masyarakatnya. Selain itu juga pemerintah perlu bermitra dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain agar saling menopang dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada.

### 2. GMT dan Klasis Amanatun Selatan

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) juga punya andil di balik upaya mengentaskan kemiskinan di bumi NTT. Karena itu, untuk bisa dengan leluasa gereja bergerak dalam isu kemanusiaan (masalah kemiskinan), maka eklesiologi gereja atau teologi yang dianut perlu dievaluasi. Gereja juga perlu memahami makna penting dari misinya di dunia. Untuk itu, maka pelayanan tidak bisa lagi difokuskan hanya di dalam gereja, tanpa keluar melihat keadaan nyata di lapangan. Sebaliknya, gereja perlu menyeimbangkan apa yang diwartakan dan apa yang akan dikerjakan. Gereja perlu untuk menyatakan tanda kehadiran Allah di bumi saat ini. Dalam menyatakan kasih Allah di dunia, gereja perlu bersikap terbuka terhadap agama-agama lain. Gereja tidak boleh menganggap agama-agama lain sebagai saingan, tetapi mereka berjalan bersama-sama. Dengan jalan melakukan dialog yang terbuka maka ini akan membantu gereja dalam menciptakan pembebasan yang sesungguhnya. Gereja diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk saling membangun. Dengan melakukan hal ini, gereja akhirnya akan dipandang sebagai utusan Allah yang benar-benar hadir untuk membawa Kerajaan Allah di dunia.

Kerjasama yang bisa dilakukan antara Gereja dengan pihak lain seperti:

1. Kerjasama gereja dan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan pelatihan kerja bagi masyarakat, seperti pelatihan membuat kain tenun kemudian setelah itu pemerintah bisa membantu dalam pemasarannya.
2. Kerjasama gereja dengan pemerintah desa untuk membuat peraturan desa mengenai pembatasan pesta-pesta di masyarakat sehingga tidak terjadi pemborosan.
3. Kerjasama gereja dengan agama-agama lain untuk melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat setempat.

4. Kerjasama gereja dengan budaya setempat dapat mencakup festival keagamaan bersama, kegiatan seni dan budaya yang mendukung nilai-nilai bersama, atau inisiatif pendidikan yang menggabungkan aspek keagamaan dan budaya setempat.